

**PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA MELALUI
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(Studi di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa
Timur)**

Anggita Dewintasari Prasetyo

Program Studi Ilmu Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
anggita.dsp19@gmail.com

Indah Murti

Program Studi Ilmu Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
indah@untag-sby.ac.id

Radjikan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
radjikan@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the Empowerment of Village-Owned Enterprises in increasing Village Original Income through the development of Micro, Small and Medium Enterprises in Wage Village, Taman District, Sidoarjo Regency. Empowerment through BUMDes is the main strategy of the village government to encourage local economic growth and optimize village potential. The method used in this study is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. Through 5 indicators used for the success of UMKM development The results of the study show that BUMDes Wage Bersinar has played an active role in supporting the development of UMKM with various programs such as providing business capital loans, training, and providing product promotion facilities to increase PADes. However, in its implementation, BUMDes is also related to capital issues. UMKM actors often complain about the lack of access to additional business capital. related to capital issues. UMKM actors often complain about the lack of access to additional business capital. BUMDes has a strategic role in village economic development. It is hoped that in the future, the synergy between BUMDes, village government, and MSME actors will be further strengthened in order to create independent and sustainable villages.

Keyword: *Empowerment, Village-Owned Enterprises, Village Original Income, Micro, Small And Medium Enterprises, Village Wage*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Pemberdayaan melalui BUMDes menjadi strategi utama pemerintah desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi local dan mengoptimalkan potensi desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Melalui 5 indikator yang digunakan untuk keberhasilan pengembangan UMKM Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Wage Bersinar telah berperan aktif dalam mendukung pengembangan UMKM dengan berbagai program seperti pemberian peminjaman modal usaha, pelatihan, dan penyediaan sarana promosi produk terhadap peningkatan PADes. Namun dalam pelaksanaannya BUMDes juga terkait persoalan permodalan. Para pelaku UMKM kerap sering mengeluhkan kurangnya akses terhadap tambahan modal usaha. terkait persoalan permodalan. Para pelaku UMKM kerap sering mengeluhkan kurangnya akses terhadap tambahan modal usaha. BUMDes memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi desa. Diharapkan ke depan, sinergi antara BUMDes, pemerintah desa, dan pelaku UMKM dan lebih diperkuat guna menciptakan desa yang mandiri dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Pemberdayaan, Badan Usaha Milik Desa, Pendapatan Asli Desa, Usaha Mikro Kecil Menengah, Desa Wage*

A. PENDAHULUAN

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang memiliki wewenang untuk mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri. Desa juga berperan sebagai peran utama dalam mendorong kemajuan Indonesia. Salah satu tujuan pemerintah yakni membangun daerah pedesaan dengan cara memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keberagaman usaha di desa, serta menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung perekonomian desa. Selain itu pemerintah berupaya membangun dan memperkuat lembaga yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya yang ada sebagai landasan pertumbuhan ekonomi di pedesaan (Fitriska, 2017).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes didirikan oleh pemerintahan desa, dan modal dana awal untuk menjalankan usaha dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat. Menurut peraturan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Nomor 4 Tahun 2015, salah satu tujuan utama pendirian BUMDes adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Pemerintah pusat memberikan seluruh wewenangnya kepada kepala desa untuk mengatur tata kelola pemerintahan desa. Undang - Undang tersebut dinilai cukup efektif karena banyak desa menjadi berkembang desa yang kuat, mandiri, dan sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya untuk meningkatkan serta memperkuat perekonomian desa dilakukan melalui pengembangan potensi - potensi lokal yang ada di desa dan selanjutnya

dikelola oleh BUMDes. BUMDes dapat menjadi waddah dalam mempromosikan produk-produk ekonomi lokal kreatif dari masyarakat desa membuat semangat para masyarakat untuk menciptakan produk kerajinan atau produk yang bisa dikerjakan dari rumah sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan urbanisasi desa ke kota.

Kabupaten Sidoarjo memiliki dari 18 Kecamatan, 31 Kelurahan, dan 322 Desa. Meski banyak memiliki desa, tidak semua desa di Kabupaten Sidoarjo memiliki BUMDes. Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sidoarjo, hingga september 2023 terdapat 263 BUMDes yang terdata di Sidoarjo. Dari jumlah tersebut, BUMDes diklasifikasikan dalam tiga kategori : 61 unit dalam kategori maju, 70 unit dalam kategori berkembang, dan 132 unit dalam kategori pemula (radarsidoarjo.jawapos.com, 2023). Kehadiran BUMDes di setiap kabupaten atau kota diharapkan menjadi pilar penggerak kegiatan ekonomi di desa.

Tabel 1.1 Klasifikasi BUMDes Berdasarkan Kategori

| Kecamatan | Desa | Nama BUMDes | Kategori |
|------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|
| Taman | Kramatjegu | Maju Sejahtera Kramatjegu | Pemula |
| Taman | Trosobo | Trosobo Sukses | Pemula |
| Taman | Sidodadi | Sidodadi Makmur | Berkembang |
| Taman | Bringinbendo | Maju Jaya Makmur Bringinbendo | Berkembang |
| Taman | Krembangan | Bhineka Jaya Kremabangan | Pemula |
| Taman | Jemundo | Mandiri Sentosa | Berkembang |
| Taman | Sadang | Anugrah | Berkembang |
| Taman | Bohor | Raharja | Pemula |
| Taman | Wage | Wage Bersinar | Maju |
| Taman | Kedungturi | Surya Sejahtera Kedungturi | Berkembang |

Sumber: Analisis Peneliti, 2024, Kecamatan Taman

BUMDes Wage didirikan berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat desa, serta didasarkan pada Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor: 06/BPD/V/2019 tanggal 4 April 2019, yang kemudian disahkan melalui Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2019 pada 3 Mei 2019 oleh Kepala Desa Wage, Bambang Heri. BUMDes Wage sering kali meraih penghargaan sebagai desa yang berhasil mengelola BUMDes. Desa wage juga memiliki beberapa prestasi yang membanggakan, salah satunya pada tahun 2019 ketika desa ini meraih juara ketiga dalam Lomba Desa Melangkah di Kabupaten Sidoarjo. Penghargaan ini diharapkan dapat membantu Desa Wage menjadi desa yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, serta menjadi contoh nasional. Selain itu, pada tahun 2022, BUMDes Wage juga berhasil meraih juara pertama dalam Lomba Obyek Wisata Kabupaten Sidoarjo (Fitriana & Eprilianto, 2022). Penghargaan - penghargaan tersebut menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mengelola unit usaha oleh BUMDes Wage. Saat ini BUMDes Wage mengelola dua unit usaha, yaitu pertama, unit usaha taman budaya Lapangan Dewata yang menyediakan wahana bermain, parkir, sewa stand untuk pelaku usaha, dan sewa tempat hiburan. Kedua, unit usaha bina UMKM yang memberikan pinjaman modal usaha Pengelolaan unit-unit usaha ini

sejalan dengan tujuan pembentukan BUMDes, yaitu menciptakan sumber perekonomian baru bagi masyarakat desa.

Pendapatan Asli Desa (PADes) suatu pendapatan yang diperoleh desa dari berbagai sumber lokal yang dikelola secara mandiri. Sumber-sumber utama PADes meliputi yang pertama terdapat Hasil Usaha Milik Desa keuntungan dari BUMDes yang didirikan dan dikelola oleh desa contohnya seperti penjualan produk-produk lokal UMKM. Yang kedua Hasil Kekayaan Desa pengelolaan aset milik desa seperti tanah kas desa, pasar desa, sumber daya air, dan asset-aset desa lainnya. Selanjutnya yang ketiga Retribusi Desa dapat berupa biaya retribusi parkir, setribusi pemakaian fasilitas umum (lapangan dan aula balai desa), dan retribusi pasar tradisional yang dikelola oleh desa. Lalu yang terakhir berasal dari hasil swadaya, partisipasi, dan gotong royong masyarakat berupa sumbangan atau kontribusi masyarakat desa yang diberikan secara sukarela, baik dalam bentuk uang, barang, maupun tenaga.

Tabel 1.2 Realisasi APBDes 2023-2024 Desa Wage

| No | Kategori | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) |
|----|----------------------|------------------|------------------|
| 1. | Pendapatan Desa | 6.579.854.078,00 | 2.738.458.697,00 |
| 2. | Pendapatan Asli Desa | 172.094.710,00 | 324.750.000,00 |
| 3. | Alokasi Dana Desa | 521.419.862,00 | 464.533.406,00 |

Sumber : Analisis Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel infografis terkait APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Desa Wage tahun anggaran 2023 dan 2024. Pendapatan Asli Desa di tahun 2023 tercatat mendapatkan 172.094.170,00, dan di tahun 2024 mendapatkan 324.750.000,00. Jadi infografis ini menunjukkan bahwa Desa Wage memiliki sistem pengelolaan APBDes yang transparan dan terstruktur. Pendapatan Asli Desa (PADes), meskipun kontribusinya relatif kecil dibandingkan dengan sumber transfer lainnya, menunjukkan adanya potensi untuk dikembangkan lebih lanjut melalui optimalisasi peran BUMDes dan penguatan ekonomi lokal. Hal ini menjadi dasar penting untuk mendorong pembangunan desa yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh penelitian terdahulu menurut (Fitriana & Eprilianto, 2022) melalui wawancara langsung dengan narasumber, observasi terhadap peran BUMDes Wage dalam pengembangan UMKM Desa Wage. Dalam permasalahannya ditemukan bahwa BUMDes Wage masih menghadapi berbagai kendala dalam memajukan UMKM Desa Wage antara lain kurangnya sumber daya manusia di BUMDes sehingga mempengaruhi kinerja mereka, kurangnya sarana dan prasarana seperti petunjuk arah di lahan fasilitas umum desa, serta kendala diantara website BUMDes Wage yang masih sering mengalami error hingga tidak dapat arahan dari petunjuk pengawasan pemilik usaha mikro kecil dan menengah yang tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya sehingga melalui penelitian terdahulu ini diharapkan dapat digunakan masukan untuk BUMDes Wage dalam memajukan UMKM Desa Wage dalam kedepannya, sehingga tidak dapat memberikan informasi secara optimal kepada masyarakat. Berdasarkan pemasaran latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli

Desa Melalui Usaha Kecil Menengah Mikro di Desa Wage Kecamatan Taman. Karena permasalahan pengeloan BUMDes peneliti ingin mengidentifikasi masalah tersebut dan memberikan solusi agar BUMDes lebih efektif dalam mengembangkan UMKM dan memberikan dampak positif ke PADes.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus di Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam tentang bagaimana BUMDes Wage Bersinar memberdayakan UMKM untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Metode kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan realitas sosial, makna, serta proses yang terjadi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat secara lebih rinci dan kontekstual. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dokumentasi. Fokus penelitian ini menggunakan 5 indikator dari teori Drijver dan Sajise yaitu pendekatan dari bawah, partisipasi, konsep berkelanjutan, keterpaduan, program pemberdayaan masyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemberdayaan BUMDes melalui pengembangan usaha UMKM

Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui pengembangan UMKM di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan peran yang semakin strategis dalam menopang ekonomi lokal. BUMDes Wage Bersinar berfungsi bukan hanya sebagai unit usaha desa tetapi juga sebagai fasilitator pertumbuhan UMKM lokal melalui sinergi program-program pemberdayaan yang berdampak langsung pada peningkatan PADes. Pemberdayaan ini dilakukan melalui beberapa pendekatan dari bawah (bottom-up), partisipasi masyarakat, keberlanjutan program, keterpaduan, serta melaksanakan program-program nyata yang berpihak pada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, peneliti menemukan bahwa proses pemberdayaan dilakukan dengan pendekatan dari bawah, dimana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam musyawarah desa. Melalui forum yang dibuat 3 bulan sekali ini masyarakat, khususnya pelaku UMKM dapat menyampaikan aspirasi dan keluh kesahnya. Hasil dari forum tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh BUMDes dan pemerintah desa, mulai dari situ BUMdes dan pemerintah desa membuat program menyediakan lapak usaha, memberikan pinjaman modal usaha. Pendekatan ini sangat efektif dikarenakan melibatkan suara masyarakat langsung sebagai pelaku utama dan pelaku UMKM, mereka sangat puas menjual produk-produk tersebut atas program yang diberikan oleh BUMDes. BUMDes menjadi fasilitator dalam memperkuat ekosistem UMKM di tingkat desa sehingga program tersebut dijalankan dengan aspirasi dan kebutuhan Masyarakat Desa Wage.

Pendekatan partisipasi masyarakat juga terlihat dari keikutsertaan mereka dalam program pelatihan yang diselenggarakan atas kerja sama dengan dinas

kabupaten. Pelatihan tersebut meliputi cara produksi, pemasaran produk, kemasan produk agar lebih menarik untuk dijual. Bahkan kemarin terdapat program penggratisan pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha) mendapatkan respon positif dari para Pelaku UMKM. Dalam setiap sesi pelatihan yang berpartisipasi cukup tinggi, dengan menunjukkan antusiasme akan pentingnya peningkatan kapasitas usaha. Terdapat 60 UMKM yang hadir untuk mengikuti pelatihan. Terdapat juga pelatihan pemanfaatan platform digital cara bagaimana menjual produk agar tidak rugi berbasis online untuk para pelaku UMKM muda.

Konsep keberlanjutan dalam pemberdayaan UMKM juga sangat diperhatikan. BUMDes Wage Bersinar tidak hanya memberi bantuan sesaat, tetapi juga menciptakan program usaha yang berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan upaya BUMDes akan menambah membuat 6 lapak UMKM di Lapangan Dewata dan tahun ini akan ditambahkan lapak-lapak lagi dan akan dibuat secara permanen di sekeliling Lapangan Dewata. BUMDes juga mendorong para pelaku UMKM memanfaatkan media online untuk pemasaran produk mereka. Pemerintah desa menekankan penguatan lembaga BUMDes dengan selalu mengevaluasi kerja BUMDes secara berkala setiap 6 bulan sekali. Program ini mampu membuat manfaat yang berkelanjutan jangka panjang bagi para pelaku UMKM dan dapat meningkatkan PADes.

Dari sisi keterpaduan program BUMDes terintegrasi dengan kebijakan pemerintah desa, kabupaten. Pemerintah desa telah mengesahkan Peraturan Desa No. 6 Tahun 2019 sebagai dasar hukum operasional BUMDes. Di tingkat kabupaten, dinas terkait rutin memfasilitasi pelatihan dan pendampingan untuk para pelaku UMKM. Kerja sama dengan pihak luar juga menjadi salah satu kekuatan BUMDes Wage Bersinar. Bekerja sama dengan Bank BRI melalui program aplikasi memfasilitasi permodalan UMKM dan digitalisasi pemasaran, serta dengan Bank Jatim melalui program Agen Jatim yang memberikan pelayanan keuangan langsung di kantor BUMDes untuk memudahkan para pelaku UMKM seperti kresit, setor tunai, dan tarik tunai, BUMDes juga menjalin kemitraan dengan JTV untuk membantu memasarkan produk-produk mereka dengan mengadakan event. Hal ini sangat bermanfaat untuk membantu masyarakat dan pelaku UMKM dan dapat membantu menambah perekonomian desa.

Pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes di Desa Wage menunjukkan perkembangan yang cukup baik dari sisi konsep maupun implementasi program. Pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya dalam bentuk bantuan finansial atau modal usaha, tetapi BUMDes berperan aktif sebagai fasilitator dan jembatan pembelajaran bagi pelaku UMKM agar mampu mandiri dalam mengelola usaha mereka secara berkelanjutan. BUMDes Wage Bersinar kemudian menyusun dan melaksanakan program pendampingan yang berfokus pada peningkatan kapasitas pelaku usaha. Salah satunya adalah mengadakan pelatihan strategi pemasaran dan pemanfaatan media sosial yang difasilitasi oleh dinas. Hal ini penting mengingat tren pemasaran saat ini bergantung pada platform digital dan kemampuan branding dari para pelaku usaha kecil. Selain program pendampingan dan pelatihan, BUMDes juga mengelola unit usaha parkir di Lapangan Dewata yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga pada pelayanan dan keamanan masyarakat. Tarif parkir yang diberlakukan Rp2.000 untuk kendaraan roda dua dan

Rp5.000 untuk roda empat. Tidak hanya menjadi sumber PADes tetapi juga solusi atas maraknya kehilangan kendaraan dan kemacetan di sekitar lapangan sebelum program ini di terapkan. Salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi yang sangat terasa dampaknya adalah program persewaan lahan di fasilitas umum. Lahan seluas 1.000 meter persegi dibagi menjadi 17 kavling berukuran 3 x 10 meter, masing-masing disewakan sebesar Rp7.500.000 yang sudah termasuk biaya air dan listrik. Program-program tersebut secara langsung berdampak pada peningkatan PADes, karena seluruh hasil usaha baik dari parkir, sewa lahan, maupun unit usaha lainnya disetorkan sebagai pendapatan asli desa. Hal ini sesuai dengan konsep BUMDes sebagai usaha yang tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga berfungsi sosial dan pembangunan.

Gambar 1.1 Lapak UMKM di Lapangan Dewata



Sumber: Analisis Peneliti 2025

Dalam rangka mendukung pengembangan UMKM di Desa Wage, BUMDes Wage Bersinar telah menetapkan beberapa ketentuan dan kesepakatan yang berlaku saat pelaku UMKM mengajukan permohonan peminjaman modal usaha. Kesepakatan ini dibuat untuk memastikan bahwa proses peminjaman berjalan secara tertib dan adil. Pertama kesepakatan awal budgeting atau nominal dana yang disepakati ditetapkan sebesar Rp. 500.000 per pelaku UMKM. Nominal ini merupakan acuan dasar yang telah disesuaikan dengan kapasitas keuangan BUMDes dan pertimbangan pemerataan penerima bantuan modal. Namun terdapat beberapa pelaku UMKM yang mengajukan overbudget atau melebihi nominal yang telah ditetapkan karena kebutuhan usaha mereka yang lebih besar dari rata-rata. Hal ini menjadi catatan penting dalam evaluasi program permodalan karena overbudget dapat menimbulkan ketidakseimbangan dana yang tersedia dan beresiko menurunkan efektivitas perputaran modal.

Kedua, jangka waktu pengembalian ditetapkan dalam kurun waktu tiga bulan, dengan ketentuan bahwa pengembalian dilakukan empat kali dalam satu tahun. Setiap cicilan mencakup pembayaran pokok pinjaman ditambah dengan bunga 1-2% per bulan. Sistem bunga ini termasuk dalam bentuk kontribusi pelaku UMKM terhadap operasional BUMDes, sekaligus bentuk tanggungjawab atas dana yang dipinjamkan. Untuk menjaga kedisiplinan dan keberlanjutan, BUMDes juga menetapkan sanksi apabila terjadi keterlambatan pengembalian pinjaman. Selain sanksi finansial, BUMDes juga mencantumkan tindakan administratif berupa

pelaporan kepada Kepala Desa jika keterlambatan pembayaran terjadi berlarut-larut. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial serta untuk memberikan kewajibannya terhadap program yang bersifat kolektif dan gotong royong.

Secara keseluruhan kesepakatan ini dirancang untuk menciptakan sistem permodalan desa yang sehat, disiplin, dan berkelanjutan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kesadaran dan komitmen kedua belah pihak. Terutama dari pelaku UMKM untuk bersikap jujur, terbuka, dan bertanggung jawab dalam mengelola dana pinjaman tersebut. Bagi BUMDes penting juga untuk terus memberikan pendampingan dan edukasi agar pelaku usaha tidak hanya terbantu secara modal dan berharap berkembang secara berkomitmen dalam menjaga kelangsungan usaha mereka.

2. Perkembangan Pendapatan Asli Desa di Desa Wage

Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemandirian dan keberhasilan pembangunan ekonomi di tingkat desa. PADes mencerminkan sejauh mana desa mampu menggali potensi lokal dan mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri untuk menunjang berbagai kebutuhan pembangunan, baik fisik maupun non fisik.

Tabel 4.2 Realisasi APBDes 2023-2025 Desa Wage

| Kategori | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) | Tahun 2025 (Rp) |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Pendapatan Asli Desa | 172.094.710,00 | 324.750.000,00 | 165.200.000,00 |

Sumber : Analisi Peneliti, 2025

Berdasarkan data infografis APBDes tahun 2023, 2024, dan 2025 yang ditampilkan di Balai Desa Wage. Adanya perubahan yang cukup signifikan dalam angka PADes selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023, PADes Desa Wage tercatat sebesar Rp172.094.710,00 angka ini menunjukkan langkah awal yang cukup baik dalam mengembangka potensi desa. Meski kontribursinya masih relatif kecil terhadap total pendapatan desa, angka ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah mulai mengarahkan fokusnya pada optimalisasi sumber daya lokal dan unit-unit usaha desa yang dikelola oleh BUMDes Wage Bersinar.

Memasuki tahun 2024, terjadi perubahan kenaikan dalam PADes yang mencapai Rp324.750.000,00. Kenaikan ini hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes mulai menunjukkan hasil nyata. Program-program seperti pelatihan UMKM, sewa lahan, optimalisasi parkir di Lapangan Dewata, serta penyediaan ruang promosi produk lokal telah berhasil mendorong peningkatan pendapatan desa secara mandiri. Peningkatan ini juga mengidentifikasi adanya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Namun pada tahun 2025, PADes kembali menurun menjadi Rp165.200.000,00. Penurunan ini patut menjadi perhatian karena menandakan adanya ketidakstabilan dalam pendapatan asli yang diperoleh desa. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterlambatan pengembalian pinjam

modal dari Pelaku UMKM, belum maksimalnya pengelolaan unit usaha desa. Meskipun terjadi penurunan, tetap perlu dicatat bahwa Desa Wage telah memiliki landasan yang kuat untuk mengembangkan sumber PADes melalui pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Data selama tiga tahun ini menunjukkan bahwa Pemerintahan Desa Wage telah melakukan upaya yang berkesinambungan dalam meningkatkan PADes meskipun belum sepenuhnya stabil dari sisi nominal, keberadaan BUMDes sebagai fasilitator desa dalam mengelola unit usaha dan menggerakkan UMKM lokal menjadi kekuatan utama dalam proses ini. Keberhasilan PADes pada tahun 2024 menunjukkan bahwa ketika pelaku usaha diberdayakan dengan baik, dilatih, dan difasilitasi tempat usaha, mereka mampu memberikan kontribusi nyata terhadap PADes.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat

a. Faktor Pendukung

Berikut merupakan faktor pendukung dalam pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (Studi di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo) adalah:

- a) Dukungan regulasi dan kelembagaan yang kuat
BUMDes tidak hanya bekerja sama dengan pemerintah Desa namun juga melakukan kerja sama dengan pihak-pihak luar contohnya dengan Bank BRI, Bank Jatim, JTV. Hal ini dapat memudahkan para pelaku UMKM melakukan transaksi dan juga memasarkan produk mereka jika terdapat event di Desa Wage.
- b) Potensi lokal UMKM yang besar dan beragam
Desa Wage merupakan desa dengan jumlah UMKM tertinggi ketiga di Kecamatan Taman. Potensi ini menjadi kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan. Keberagaman bidang usaha seperti makanan dan minuman, kerajinan tangan, dan batik menjadi peluang besar yang mampu diolah dan dikelola oleh BUMDes untuk menambah nilai ekonomi.
- c) Partisipasi aktif masyarakat dan pelaku UMKM
Keterlibatan masyarakat desa, terutama pelaku UMKM dalam berbagai program pemberdayaan seperti pelatihan dan pendampingan untuk para pelaku UMKM, yang dilakukan oleh BUMDes menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi, dimana aspirasi masyarakat dijadikan dasar dalam merancang program-program pemberdayaan.
- d) Inovasi dalam strategi pemasaran
Adanya pelatihan bimbingan teknis dalam pemasaran produk menjadikan faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk UMKM Desa Wage. BUMDes Wage Bersinar aktif mendorong pelaku UMKM untuk memasarkan produknya melalui platform online dan event, sehingga produk mereka kini dapat dikenal luas bahkan di luar wilayah.

b. Faktor Penghambat

Faktor lain yang turut menghambat adalah terkait persoalan permodalan. Para pelaku UMKM kerap sering mengeluhkan kurangnya akses terhadap tambahan modal usaha. Menurut keterangan BUMDes, banyak diantara mereka yang tidak

menjalankan kewajiban pengembalian pinjaman sesuai jadwal yang telah disepakati. Beberapa pelaku UMKM bahkan menunjukkan sikap yang kurang bersahabat saat dilakukan penagihan Ketidakteraturan dalam pengembalian modal ini mengakibatkan langsung terhadap kemampuan BUMDes dalam melakukan rotasi dana dan memberikan modal berikutnya kepada pelaku usaha yang lain. Akibatnya, dana yang seharusnya dapat berputar menjadi terhenti, sehingga menghambat siklus keuangan yang berkelanjutan.

D. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes Wage Bersinar memiliki peran penting dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui pengembangan UMKM di Desa Wage. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada penyaluran bantuan atau pembukaan usaha, tetapi juga mencakup pendampingan menyeluruh seperti pelatihan manajemen, pemasaran digital, penyediaan tempat usaha, dan pengelolaan parkir yang berdampak nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini tercermin dari peningkatan PADes dari Rp172 juta pada 2023 menjadi Rp324 juta pada 2024, meskipun kemudian menurun menjadi Rp165 juta pada 2025, yang lebih mencerminkan tantangan pengelolaan daripada kegagalan. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan modal, rendahnya kesadaran pelaku UMKM terhadap kewajiban finansial, serta belum optimalnya kolaborasi antar pihak.

Saran yakni BUMDes perlu meningkatkan pendekatan yang lebih inklusif terhadap pelaku UMKM, memperkuat kapasitas SDM pengurus, memperluas jenis usaha ke sektor produksi atau perdagangan, serta membangun sistem pengelolaan dan monitoring yang lebih efektif agar program-program yang dijalankan dapat berkelanjutan dan berdampak jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiffudin. (2010). *Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep Teori Dan Implikasinya Di Era Reformasi*. Alfabeta : Bandung.
- Afriansyah, Afdhal, Mustanir, A., Faried, A. I., & Mursalat, A. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat*. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Amalia, F., & Sinaga, R. (2022). *EKONOMI PEMBANGUNAN* (R. Kusumaningrum, Ed.). WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG (Grup CV Widina Media Utama).
- Anggara, S., & Sumantri, L. (2016). *ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, TEORI DAN PRAKTIK* (B. A. Saebani, Ed.). CV PUSTAKA SETIA.
- Arliman, L. (2019). Partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan uang desa pasca undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. *Arena Hukum*, 12(2), 296–317.
- Fitriana, E. N., & Eprilianto, D. F. (2022). *Peran Badan Usaha Milik Desa PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DALAM UPAYA MEMAJUKAN UMKM DESA DI DESA WAGE KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO*.
- Hasanah, Andriyani, L., Purnamasari, O., Hakim, L., Izzatusholekha, Meisanti, Jamiati, Patrianti, T., & Sumarni, L. (2021). *MANAJEMEN BUMDes*

UNTUK KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT DESA KURIPAN, KECAMATAN CISEENG, KABUPATEN BOGOR. UM Jakarta Press Anggota IKAPI.

- Hasdiansyah, A. (2023). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*. EUREKA MEDIA AKSARA, OKTOBER 2023 ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH .
- Mulyaningsih. (2019). *Pembangunan Ekonomi*. CV. Kimfa Mandiri.
- Raharjo, M. M. (2020). *Pengelolaan Dana Desa*. Bumi Aksara.
- Saefullah, E., Rohaeni, N., & Tabroni. (2022). *Manajemen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM*. CV. Eureka Media Aksara.
- Siagian, S. P. (2009). *Administrasi Pembangunan*. Bumi Aksara.
- Silalahi, U. (2002). *Pemahaman Praktis Azas-azas Manajemen*. Bandung: CV. Maju Mundur.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Suleman, A. R., Revida, E., Soetijono, I. K., Siregar, R. T., Syofyan, S., Hasibuan, A. F. H., Silitonga, H. P., Rahmadana, M. F., Silalahi, M., & Syafii, A. (2020). *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Yayasan Kita Menulis.